

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa

**Frisilia Jolanda Kalalo
Femmy Tulusan
Joorie Ruru**

***Abstract:** This study berwal of experiences to the principal that is, the extent to which the influence of the leadership of the head of the village to increase public awareness in paying taxes on land and buildings in the village kaayuran south district under the District Langowan minahasa. Thus this study aims to analyze the influence of the leadership of the head of the village to increase public awareness in paying taxes on land and buildings in the village kaayuran south district under the District Langowan minahasa. This study uses quantitative methods to approach the descriptive analysis of data and information collected through questionnaires distributed to the technique 53 respondents were equipped with observation technique by applying the technique of frequency tables, analysis of product moment and simple linear regression. Based on the results of the data analaisi known that the answer respoenden on leadership clod village is in a class interval between 22-25 with a . \pm frequency of 25 respondents, or 47.2% This indicates that the average score of variable Leadership Village Head (X) are in the category of "high" while in the pay of the UN Awareness (Y) beada the class interval between 22-25 with a frequency of 23 \pm respondents, or 43.4% , It can be interpreted that the average scores in the Public Awareness variable pay land and building tax (Y) in the village of Down District Langowan Kaayuran the South are in the category of "high" It can be concluded that the Leadership Village Head Down Kaayuran Southern District Langowan very ignifikan positive effect on the level of public awareness in paying property tax The village head in implementing transformational leadership style tends to rely more effective in raising public awareness and building earth to pay tax, in particular in Kaayuran village Down South Minahasa District Langowan.*

***Keywords:** Leadership village head, Awareness In Pay Property Tax*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas di sepanjang peradaban umat manusia. Terlebih pada zaman sekarang ini yang semakin buruk saja moral dan mentalnya. Ibaratnya, semakin sulit mencari pemimpin yang baik (*good leader*). Pemimpin yang baik sebenarnya pemimpin yang mau berkorban dan peduli untuk orang lain serta bersifat melayani tetapi kenyataannya berbeda.

Bila kita lihat sekarang para pemimpin kita, dari lapisan bawah sampai lapisan tertinggi, dari pusat hingga ke

daerah- daerah. Banyak pemimpin yang hadir dengan tanpa mencerminkan sosok pemimpin yang seharusnya, malah terlihat adanya pemimpin-pemimpin yang jauh dari harapan rakyat, tidak peduli dengan nasib rakyat bawah, dan hampir tidak pernah berpikir untuk melayani masyarakat. Karena kepemimpinan mereka lebih dilandasi pada keinginan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok.

Penyelenggaraan pembangunan di daerah Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-

prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab di daerah secara seimbang yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Kesemuanya itu diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang merupaka pioneer pembangunan di desa. Ralph M. Stogdill dalam Sopiah (2008:108) menyatakan “jumlah batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai kepemimpinan hampir sama banyaknya dengan jumlah orang yang mencoba memberikan batasan tentang konsep tersebut”. Kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka, dan kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok (Bernards M. Bass, 1990: 21).

Terry (1998:17) berpendapat kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya. (Rensis Likert, 1961: 30).

Kepemimpinan adalah suatu rangkaian bagaimana mendistribusikan

pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentu. (J.A. Klein dan P.A. Pose 1986: 125). Anagora (1992) dalam Harbani (2008:5) mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi (Stogdill dalam Stoner dan Freeman 1989: 459-460).

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Kepemimpinan juga merupakan proses menggerakkan grup atau kelompok dalam arah yang sama tanpa paksaan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi

unggulan dan karakteristik daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 12 dan 13 disebutkan tentang Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan Pemerintah. Penyaluran dana bagi hasil PBB sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Daerah Kota dan Kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh Camat dalam tugasnya menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota atau Bupati. Kecamatan mempunyai perangkat yaitu Lurah atau Kepala Desa sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1007/kmk.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan provinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peranan kepala daerah sangat dituntut dalam hal pemungutan pajak ini.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar

pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Menurut Munawir (1994:308), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan hasil pajak ini diarahkan kepada tujuan kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan objek pajak sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001:5), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang di pentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Menurut Sri dan Suryo (2003:1), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber pemasukan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran dari masyarakat untuk membayar Pajak dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat berkekurangan atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat sumber daya manusia (SDM) masyarakat, sehingga mereka sering kali tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri.

Kurangnya kesadaran masyarakat serta anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan Negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu situasi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar dalam membayar pajak. Memberikan pengarahan serta bimbingan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang sangat penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, maka peneliti mengambil Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan sebagai lokasi penelitian. Desa kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa yang selama ini dikenal dengan pengelolaan pajak Bumi dan Bangunannya berjalan dengan baik, meskipun masih ada sedikit masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya. Adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan dalam membayar pajak tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa terdepan untuk dapat memotivasi aparat dan

masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan belum mengetahui fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisa deskriptif kuantitatif. Dalam hal ini mencari pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kepemimpinan (X) dan variabel kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Y). Setiap variabel menurut Singarimbun (1989) membutuhkan indikator pengukuran.

Indikator variabel kepemimpinan ialah: (1) memberikan motivasi kepada masyarakat, yaitu untuk mendapatkan hasil yang baik secara optimal, (2) tanggung jawab sebagai seorang pemimpin terhadap setiap keputusan yang diambil, (3) keaktifan pemimpin dalam mendorong berpartisipasi dan memberi perhatian timbal balik dengan masyarakat, (4) komunikasi, yaitu terdiri dari memberikan informasi, stabilisator, fasilitator.

Indikator variabel kesadaran masyarakat dalam membayar PBB ialah: (1) struktur Sosial Masyarakat mencakup lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat, tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB, kehidupan ekonomi masyarakat, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar PBB, sikap petugas dalam menagih PBB, cara petugas bersikap dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajiannya dalam membayar PBB, usaha yang dilakukan petugas agar wajib pajak dapat menerima penjelasan tugasnya dalam menagih PBB. (2) Pelayanan Pemerintah mencakup usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB, insentif pembayaran pajak, berupa pelayanan pemerintah yang lebih baik, keadilan perlakuan bagi wajib pajak, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari masyarakat. (3) Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak mencakup adanya aspek kemudahan dalam memahami peraturan dan pengisian formulir PBB, dan proses pembayaran PBB yang mudah diikuti wajib pajak. (4) Sanksi mencakup pengetahuan wajib pajak tentang sanksi, penerapan sanksi secara tegas dan adil.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Keluarga Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan 210 Kepala Keluarga.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2003:91), merujuk pada pendapat Arikunto (1994:104) yang mengatakan, apabila populasi kurang dari 100 orang, maka diambil dari keseluruhannya namun apabila jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka sampel diambil sebesar 10%, 20%, 25% atau lebih. Oleh karena itu

merujuk pada pendapat diatas dikarenakan populasi kurang dari 100 orang, maka sampel penelitiannya sebanyak 100% atau keseluruhan populasi, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 53 Kepala Keluarga atau sebanyak 25% untuk dijadikan sebagai responden.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu: metode observasi, metode angket dan studi dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian kepemimpinan kepala desa dan kesadaran masyarakat membayar pajak, dan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan model persamaan regresi yaitu: $Y = a + bX$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis regresi sederhana dengan persamaan $\hat{Y} = -0,580 + 0,997X$, dan korelasi *product moment* dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,891 dapat teruji hipotesis yang menyatakan “ terdapat pengaruh yang positif antara kepemimpinan Kepala Desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB”, pada taraf signifikansi 1%. Sementara itu, kontribusi atau pengaruh faktor kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB, diperoleh sebesar 79,4%. Hal ini bermakna bahwa variasi perubahan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) turut dipengaruhi oleh variasi perubahan faktor kepemimpinan kepala desa sebesar $\pm 79,4\%$, dan sisanya sebesar $\pm 20,6\%$ turut ditentukan oleh faktor-faktor lain.

Begitu besarnya pengaruh atau kontribusi faktor kepemimpinan Kepala Desa terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

dapat dibenarkan, baik secara empirik maupun secara teoritis, karena keberhasilan sebuah organisasi publik sebagian terbesar ditentukan sejauhmana kepemimpinan seseorang sebagai pemimpin dalam memerankan kepemimpinannya, sehingga mampu menciptakan kondisi yang kondusif, baik bagi bawahan maupun masyarakat untuk mendorong mereka dalam mengerahkan seluruh kemampuannya secara optimal guna pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, termasuk memotivasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Secara teoritis, apabila dikaitkan dengan teori-teori kepemimpinan, maka jelaslah ada kesesuaiannya, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, di antaranya, Bass dan Reggio (2006:6) yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi yaitu : *idealized influence, inspirational motivation, intellectual simulation, and individualized consideration*.

Pengaruh ideal (keteladanan atau kharismatik) adalah perilaku yang membangkitkan emosi dan identifikasi yang kuat dari pengikut terhadap pemimpin. Pemimpin dipersepsikan oleh bawahan sebagai tauladan dalam aktivitas keorganisasian untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin mempraktekkan bagaimana selayaknya anggota organisasi bekerja dan bertindak sesuai dengan misi untuk menggapai visi organisasi dan menghadirkan diri ketika bawahan menghadapi permasalahan. Praktek-praktek tersebut menjadi motivator dan diidentifikasi oleh bawahan dalam melaksanakan tugasnya.

Hal senada dikemukakan oleh Yukl (1998) bahwa pemimpin transformasional dalam dimensi pemimpin kharismatik memiliki pengaruh yang besar terhadap bawahannya. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mampu menimbulkan emosi-emosi yang kuat. Pemimpin diidentifikasi sebagai panutan oleh bawahan, dipercaya,

dihormati, dan memiliki visi yang jelas. Dengan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya, pemimpin kharismatik mudah mengarahkan bawahannya untuk mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya bagi kepentingan organisasi yang mengarah kepada tercapai apa yang menjadi tujuan organisasi.

Kaitannya dengan kepemimpinan Kepala Desa di Minahasa yang dikenal dengan istilah Hukum Tua, menunjukkan bahwa kepala desa di Minahasa selain sebagai pemimpin formal, karena dipilih oleh rakyat, juga sebagai pemangku adat, sehingga keteladanan dan kharimatik yang terpancar dari sosok seorang hukum tua mampu mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil analisis data dan pembahasannya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan kepala desa yang dipersepsikan responden berada pada kategori tinggi, demikian halnya dengan keadanan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa.
2. Kepemimpinan Kepala Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Penerapan gaya kepemimpinan transformasional oleh Kepala Desa cenderung lebih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, khususnya di desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang diajukan sebelumnya dapat teruji keberlakuannya secara empiris sekaligus menjustifikasi teori-teori yang mendasarinya.

B. Saran-Saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain :

1. Kepala desa sebagai pemimpin formal yang lebih dekat dengan masyarakat, hendaknya menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dengan menekankan pada dimensi-dimensi pengaruh ideal (keteladanan atau kharismatik) dan dimensi motivasi inspirasional sehingga diharapkan dapat memacu peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Disarankan agar peneliti lain dapat melakukan penelitian dengan mengambil variabel bebas lain dalam mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B.M. 1990. *Bass and Stogdill's Hand Book of Leadership*. New York: Free Press.
- Bass, Bernard M. dan Ronald E. Reggio. 2006. *Transformational Leadership, Second Edition*. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Plubichers.
- Effendi, Taufiq, 2006. *Bahan Ceramah Sespimpolri Lembang*. Bandung tanggal 16 Oktober 2006.
- George R. Terry, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Harbani, Pasolong.2008.*Kepemimpinan Birokrasi*, CV.Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan, Melayu, S.P, 2004, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta
- Munawir, 1994, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.

- Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Singarimbun, Masri.1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3S, Jakarta
- Sopiah. 2008, *Perilaku Organisasi*, Andi, Yogyakarta.
- Terry, George R. 1998, *Principles of Management*, Saduran Drs. Sujai, Penerbit Grafika, Bandung.
- Yukl, Gary, 1998. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi Ketiga. Terjemahan Yusuf Udana. Jakarta : Prenhalindo